

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah tujuan dari suatu negara, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub 2012).

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian.

Pratama (2014) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih mengalami masalah kemiskinan sebesar 24% jika angka kemiskinan di bawah 1\$US dari 240 juta jiwa. Namun, jika angka

kemiskinan menggunakan standar hidup dibawah 2\$ maka angka kemiskinan tersebut melonjak menja-di 35%. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dirasa masih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada.

Berbicara mengenai kemiskinan, tidak mudah dalam mendefinisikannya, karena kemiskinan bersifat relatif sehingga sulit untuk menjabarkan kemiskinan itu sendiri. Berangkat dari masalah tersebut, maka ada lembaga dan banyak pakar yang mencoba untuk merumuskan dan menjabarkan definisi kemiskinan. Dari berbagai teori-teori yang dirumuskan para pakar, sudah tentu mempunyai versi masing-masing yang berbeda. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi atau sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan ditinjau dari segi ekonomi adalah suatu kondisi dimana suatu subjek mengalami keterbatasan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga mengganggu tercapainya tujuan. Kemiskinan ekonomi merupakan kemiskinan yang paling banyak mempengaruhi kehidupan objek bersangkutan. Kemiskinan deapat melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan lagi bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya (alamiah miskin). Alamiah miskin yang dimaksud adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam, miskin juga masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, kemiskinan dilatar belakangi oleh terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan akibat dari terbatasnya pemilikan alat produksi sehingga upah yang didapatkan sangat rendah dan tidak adanya inisiatif untuk menabung sebagai simpanan yang bisa digunakan ketika butuh untuk keperluan yang sangat penting. Dengan indikator ekonomi maka kemiskinan bisa dari produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah. Maka untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Sharp et al, kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu rendahnya kualitas angkatan kerja, akses yang sulit terhadap kepemilikan modal, rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tingginya pertumbuhan penduduk.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagaimana orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “ Negara berkembang” biasa digunakan untuk merujuk kepada Negara-negara yang “Miskin”. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita yang terjadi pada suatu daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli dan banyak penganggur.

. Kondisi sebagian besar alam di provinsi NTT tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang di hadapi warga NTT hampir setiap tahun. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada akhirnya menjadi mata-rantai lanjutan dari persoalan itu. Sumberdaya alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini potensi setiap kabupaten tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah NTT. Hal ini di sebabkan karena masih kurangnya investasinya yang di lakukan.

Masih tingginya kemiskinan menunjukkan penanganan yang di laksanakan pemerintah untuk masyarakat miskin belum mampu untuk menjangkaunya.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah yang mulai di berlakukan sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai UU No.22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Secara langsung, hal ini menunjukkan pertumbuhan itu perlu di pastikan terjadi di sektor-sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal. (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Adapun kemiskinan pada aspek ekonomi terdapat beberapa hal yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendah rendahnya taraf pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, kondisi terisolasi dan tingginya

tingkat pengangguran sehingga dengan adanya permasalahan, permasalahan ini maka tidak akan sejahtera dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah/kota.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Belu Tahun 2013-2017 (Persen)**

No	Kecamatan/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Raimanuk	3,76	3,80	3,61	3,97	3,82
2	Tasifeto barat	4,11	4,74	4,53	4,34	4,36
3	Kakuluk Mesak	4,16	4,52	4,13	4,05	4,31
4	Nanaet Dubesi	1,12	1,00	1,04	1,06	1,05
5	Atambua kota	6,80	7,64	7,82	7,44	7,29
6	Atambua Barat	6,41	6,81	5,82	6,17	6,09
7	Atambua Selatan	5,88	5,41	5,58	5,37	5,83
8	Tasifeto Timur	4,66	4,21	4,46	4,59	4,55
9	Raihat	2,86	2,81	3,19	3,30	3,14
10	Lasiolat	1,59	1,54	1,45	1,59	1,70
11	Lamaknen	2,59	2,22	2,19	2,33	2,34
12	Lamaknen Selatan	1,97	1,77	1,80	1,84	2,03
	<b>Kabupaten Belu</b>	<b>45,91</b>	<b>46,47</b>	<b>45,62</b>	<b>46,05</b>	<b>46,51</b>

Sumber: Data BPS Kabupaten Belu.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu (12 Kecamatan). Dalam perbandingan rata-rata jumlah penduduk miskin di seluruh kecamatan Kabupaten Belu tahun 2013-2017, Kota Atambua memiliki kemiskinan rata-rata 36,99%. Dimana Kota Atambua menduduki peringkat yang pertama termiskin di Kabupaten Belu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu (12 Kecamatan) tahun 2013-2017, kecamatan Atambua Barat memiliki kemiskinan rata-rata 31,30%. Dimana Kecamatan Atambua Barat menduduki peringkat yang kedua termiskin di Kabupaten Belu dan Kecamatan Atambua Selatan memiliki kemiskinan rata-rata 28,07%. Dimana kecamatan Atambua Selatan menduduki peringkat ketiga termiskin setelah Kota Atambua dan Atambua Barat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu, kualitas daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau sering di sebut dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dimana pembangunan ekonomi yang berjalan dengan baik di Kabupaten Belu akan memberikan hasil optimal yang apabila PDRB mengalami peningkatan terus menerus di sertai dengan perbaikan kualiatas hidup di masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan pembangunan ekonomi yang diharapkan tidak tercapai dalam mensejahterakan masyarakat. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang mendasar, dimana jumlah penduduk dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah karena jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menjadi sebab tujuan pembangunan ekonomi menjadi terhambat.

Ada pula faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu juga dapat disebabkan oleh upah minimum. Menurut boediono,(199) upah minimum regional adalah upah yang diterima oleh para pekerja dan harus di bayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis dapat mensejahterakan penduduk disekitarnya. Paradigma ekonomi masih bertumpuh pada ekonomis kemiskinan merupakan persoalan kolektif dan struktural akibat dari kontruksi ekonomi, sosial dan politik yang berkembang di masyarakat .sedangkan di dalam pemerintah sendiri, dengan

adanya subsidi terhadap kenaikan barang yang berimbas pada masyarakat menjadi hilangnya subsidi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan yang ingin di pecahkan dalam masalah ini adalah:

1. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat pengangguran, kesehatan terhadap kemiskinan secara parsial di kabupaten Belu?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, kesehatan secara bersama-sama atau secara simultan di kabupaten Belu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat pengangguran, kesehatan terhadap kemiskinan secara parsial di kabupaten Belu.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan, tingkat pengangguran, Kesehatan secara bersama-sama atau secara simultan di kabupaten Belu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemiskinan dari aspek ekonomi di Kabupaten Belu. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

### **1.4.1 Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Belu.

### **1.4.2 Pemerintah**

sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan merancang beberapa pilihan alternatif kebijakan yang tepat untuk bisa mengurangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Belu. Sehingga masyarakat bisa hidup dengan sejahtera.

### **1.4.3 Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan menambah referensi perpustakaan fakultas.

### **1.4.4 Peneliti dan Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan dari aspek ekonomi sehingga mengetahui penyebab besarkemiskinan dari aspek ekonomi terkhusus di Kabupaten Belu.